



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 84 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK-07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK-07/2021 tentang Pengelolaan Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ jasa di Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 05);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 09).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
3. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Timur;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;

11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
12. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa;
13. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
14. Bendahara Desa adalah Kepala Urusan Keuangan Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;
15. Standar biaya umum desa adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan pemerintah desa dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
16. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

## **BAB II STANDAR BIAYA UMUM**

### **Pasal 2**

- (1) Standar Biaya Umum digunakan sebagai harga satuan umum untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Tahun 2022;
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Standar honorarium;
  - b. Standar biaya penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Standar biaya umum desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

- (1) Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan dengan mengacu pada standar biaya umum desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini serta dengan memperhatikan norma kepatutan dan kewajaran serta sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat mata anggaran belanja desa yang belum ditetapkan standar biaya umumnya, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dimaksud dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya umum daerah.

### **Pasal 5**

- (1) Besaran standar satuan biaya umum menjadi harga tertinggi dalam perencanaan dan kegiatan;
- (2) Uang harian, transport dan penginapan dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah.

### **BAB III PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 30 Desember 2021

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd**

**M. DAWAM RAHARDJO**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 30 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd**

**Ir. MOCH. JUSUF**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 84

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 84 TAHUN 2021  
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

**STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

**A. BESARAN HONORARIUM :**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1.	<b>Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang dan Jasa :</b>			- Maksimal 1% dari pagu kegiatan; - Honor TPK yang dibayarkan sesuai dgn waktu pelaksanaan kegiatan mak. Untuk 3 bulan.
	Ketua	ob	200.000,-	
	Sekretaris	ob	150.000,-	
	Anggota	ob	125.000,-	
2.	<b>Tim Penyusunan RPJMDes, RKPDes, RAPBDes :</b>			Per-kegiatan, jumlah Tim minimal 7 orang, maksimal 11 orang
	Pembina	ob	250.000,-	
	Ketua	ob	200.000,-	
	Sekretaris	ob	175.000,-	
3.	<b>Pengelola Keuangan Desa :</b>			Anggota PPKD hanya dianggarkan selama 6 (enam) bulan
	PKPKD	ob	400.000,-	
	Koordinator PPKD	ob	300.000,-	
	Kaur Keuangan Desa	ob	200.000,-	
4.	<b>Anggota PPKD (5 orang)</b>	ob	100.000,-	
	<b>Pantia Pelaksana Non Fisik :</b>			Per-kegiatan, dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan
	Ketua	ob	200.000,-	
	Sekretaris	ob	150.000,-	
Bendahara	ob	125.000,-		
5.	<b>Anggota</b>	ob	125.000,-	
	<b>Tim Pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD :</b>			Per-kegiatan, dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan
	Penanggungjawab	ob	250.000,-	
	Ketua	ob	200.000,-	
Sekretaris	ob	175.000,-		
6.	<b>Anggota</b>	ob	150.000,-	
	<b>Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Petugas Pelatihan/Bimtek/Kegiatan Lainnya Tingkat Desa :</b>			
	Narasumber dari Eselon II atau yang disetarakan		Rp. 800.000,-/Jam	
	Narasumber dari Eselon III atau yang disetarakan		Rp. 700.000,-/Jam	
	Narasumber Non Eselon dari Kabupaten		Rp. 550.000,-/Jam	
	Narasumber dari luar Desa penyelenggara		Rp. 300.000,-/Jam	
	Narasumber dari dalam Desa		Rp. 200.000,-/Jam	
	Moderator		Rp. 150.000,-/Kegiatan	
Pembawa acara/Pembaca Do'a		Rp. 100.000,-/Kegiatan		
Petugas Komputer		Rp. 100.000,-/Kegiatan		

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA (Rp)</b>	<b>KET.</b>
<b>7.</b>	<b>Honorarium/Insentif Lainnya :</b>			
	Operator Siskeudes	ob	700.000,-	Besaran harga satuan tersebut adalah harga maksimal, disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
	Operator Prodeskel	ob	200.000,-	
	Operator Website Desa	ob	200.000,-	
	Operator Sipades/Pengurus Barang	ob	200.000,-	
	Operator SIKS-NG	ob	200.000,-	
	Petugas Kebersihan/Penjaga Kantor Desa	ob	200.000,-	
	Kader Posyandu/Kader Kesehatan Desa	ob	200.000,-	
	Tenaga Pendidik PAUD	ob	150.000,-	
	Satuan LINMAS	ob	100.000,-	
	Ketua/Anggota LPM	ob	100.000,-	
	RT	ob	490.000,-	
	Guru Ngaji/Marbot/Penjaga Makam/Kaum/ Petugas Pengairan Sawah (ili – ili)	ob	100.000,-	
	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	ob	250.000,-	
	Petugas Pengelola Perpustakaan	ob	100.000,-	
	Kader Posyantek Desa	ob	100.000,-	
	Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa	ob	100.000,-	
	Petugas Bencana Desa	ob	100.000,-	
	Ketua Lembaga Adat Desa	ob	100.000,-	
	Guru Ngaji/TPQ	ob	100.000,-	
	Ketua Karang Taruna	ob	100.000,-	

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd**

**M. DAWAM RAHARDJO**

**B. STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA :**

<b>NO.</b>	<b>JENIS BELANJA</b>	<b>SATUAN (Rp).</b>
1.	Makan Minum	Nasi Kotak Rp. 25.000,-/kotak Snack Rp. 10.000,-/kotak
2.	Perawatan Kendaraan Dinas Roda Dua	Rp. 1.000.000,-/unit/Tahun
3.	Biaya Pemeliharaan Kantor : a. Komputer PC b. Laptop c. Printer d. Air Conditioner	Rp. 600.000,-/unit/Tahun Rp. 600.000,-/unit/Tahun Rp. 500.000,-/unit/Tahun Rp. 500.000,-/unit/Tahun
4.	Biaya Jasa Kanto : a. Biaya Listrik b. Biaya Air (PDAM)	Rp. 250.000,-/bulan Rp. 100.000,-/bulan
5.	Jasa Internet	Rp. 500.000,-/Bulan
6.	Sewa Hosting	Rp. 100.000,-/Tahun
7.	Belanja Pakaian Dinas : a. Pakaian Dinas Harian b. Pakaian Olah Raga c. Pakaian Batik	Rp. 550.000,-/Stel Rp. 350.000,-/Stel Rp. 300.000,-/Stel
8.	Biaya Oprasional BPD	Rp. 3.000.000,-/Tahun
9.	Biaya Oprasional LPM	Rp. 3.000.000,-/Tahun
10.	Biaya Oprasional PKK	Rp. 3.000.000,-/Tahun
11.	Uang Saku/Transport Lokal Untuk Kegiatan/ Pelatihan	Rp. 50.000,-/hari
12.	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas :	
	A. Dari Desa Ke Kabupaten :	
	Desa di Kec. Bumi Agung ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Purbolinggo ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Way Bungur ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Raman Utara ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Batanghari Nuban ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Pekalongan ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Metro Kibang ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Batanghari ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Sekampung ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Marga Tiga ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Labuhan Ratu ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Way Jepara ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Braja Selebah ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	Desa di Kec. Mataram Baru ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	Desa di Kec. Bandar Sribhawono ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	Desa di Kec. Melinting ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari



<b>NO.</b>	<b>JENIS BELANJA</b>	<b>SATUAN (Rp).</b>
	Desa di Kec. Gunung Pelindung ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	Desa di Kec. Labuhan Maringgai ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	Desa di Kec. Sekampung Udik ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	Desa di Kec. Pasir Sakti ke Kabupaten	Rp. 200.000,-/hari
	Desa di Kec. Jabung ke Kabupaten	Rp. 200.000,-/hari
	Desa di Kec. Marga Sekampung ke Kabupaten	Rp. 200.000,-/hari
	Desa di Kec. Waway Karya ke Kabupaten	Rp. 200.000,-/hari
	B. Dari Desa ke Provinsi dan antar Kabupaten	Rp. 350.000,-/hari
	C. Dari Desa ke Luar Provinsi	Rp. 500.000,-/hari
	D. Dari Desa ke Desa, dari Desa ke Kecamatan	Rp. 75.000,-/hari
14.	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas :	
	a. Dalam Provinsi	Rp. 350.000,-/malam
	b. Luar Provinsi	Rp. 500.000,-/malam

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd**

**M. DAWAM RAHARDJO**